DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ancel, Marc, Social Defence A Modern to Criminal Problem, Rouledge, London, 1965
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan hukum Pidana*, PT.Citra Adytia Bakti, Bandung, 1998.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2001.
- -----, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2005.
- C.S.T Kansil dan Christina S.T., *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta 2007.
- E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1987.
- E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1996.
- Johannes Andenaes dalam bukunya Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Kitab Lengkap, Seri Perundang-undangan, PT.Buku Seru, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
- Laden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia*, *Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.
- -----, Ambiguitas Dalam Penerapan Doktrin Hukum Pidana, Antara Doktrin Ultimum Remedium dan Doktrin Primum Remedium, 2013.
- Pontang Moerad B.M, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.

- Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sudaro, *Hukum Pidana I*, cetakan ke II, Yayasan Sudarto FH-Undip, Semarang, 1990.
- Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986.
- -----, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Masalah-Masalah Hukum*, FH-Undip, Semarang, 1987.
- -----, Hukum Pidana I, cetakan ke II, Yayasan Sudarto FH-Undip, Semarang, 1990.
- Sutan Remy Syahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT.Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2006.
- Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Binacipta, Bandung, 1996.
- -----, Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sampai dengan Amandemen ke IV tahun 2002;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.Tap/III/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Indonesia dan Mengubah KUHP.
- -----, Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*.
- -----, Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- -----, Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- -----, Nomor 25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik*.
- -----, Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- -----, Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

- -----, Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- -----, Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- -----, Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan di Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang *Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang *Rekam Medis*.

Sumber-Sumber Lain

Allianz Indonesia, Allianz Health and Corporate Solutions 2018 tentang SmartProtection, Jakarta, 2018.

Allianz Indonesia, The BluePrint2017, Jakarta, 2017

Allianz Indonesia, 5 Menit Yang Berharga Untuk Pencari Nafkah Bagi Keluarga, Jakarta, 2017